
Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan pada UMKM di Desa Labuhan Sumbawa

Fahlia¹, Diah Intan Syahfitri², Oryza Safitri³, Jayanti Mandasari⁴

Program Studi Kewirausahaan, Universitas Teknologi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Indonesia¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Indonesia²

Program Studi Ilmu Aktuaria, Universitas Teknologi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Indonesia³

Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Indonesia⁴

✉

Email Korespodensi: fahlia@uts.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 22-03-2026

Disetujui 02-04-2026

Diterbitkan 04-04-2026

Katakunci:

Manajemen Keuangan;
Kepatuhan Perpajakan;
UMKM; Pengabdian
Masyarakat; Labuhan
Sumbawa.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menghadapi kendala struktural yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Observasi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi dasar, tidak menyelenggarakan pencatatan keuangan formal, dan sama sekali tidak memahami kewajiban perpajakan yang berlaku berdasarkan rezim PP 55/2022 yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kepatuhan perpajakan di kalangan pemilik UMKM melalui pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatif (Participatory Action Research/PAR) yang terstruktur. Program ini mencakup tiga tahap: analisis situasi dan asesmen kebutuhan; pelaksanaan lokakarya intensif yang meliputi pelatihan pencatatan keuangan menggunakan format pembukuan sederhana serta sosialisasi perpajakan terkait pendaftaran NPWP, penghitungan penghasilan berdasarkan skema tarif final 0,5%, dan prosedur e-Filing; serta diikuti dengan pemantauan dan evaluasi. Sebanyak 40 peserta UMKM terlibat dalam program ini. Evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan manajemen keuangan, dengan nilai rata-rata meningkat dari 42,8 menjadi 78,6, atau kenaikan absolut sebesar 35,8 poin. Secara kualitatif, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sederhana dan memahami kewajiban perpajakan mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan program literasi keuangan yang berkelanjutan ke dalam strategi pengembangan UMKM perdesaan, dengan dukungan kelembagaan formal dari pemerintah daerah dan kantor pelayanan pajak.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fahlia, Syahfitri, D. I., Safitri, O., & Mandasari, J. (2026). Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan pada UMKM di Desa Labuhan Sumbawa. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 662-674. <https://doi.org/10.63822/5qcw6p34>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM yang beroperasi di seluruh penjuru Indonesia, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 61 persen terhadap PDB. Meski demikian, kontribusi masif tersebut tidak serta-merta berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan keuangan dan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM, yang secara umum masih berada pada taraf yang sangat rendah, terutama di wilayah-wilayah semi-perkotaan dan pedesaan.

Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu sentra ekonomi pesisir yang strategis. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang beragam, meliputi usaha perdagangan hasil laut, warung makan dan jasa kuliner, kerajinan tangan lokal, pertanian hortikultura skala rumah tangga, hingga usaha jasa transportasi dan bengkel. Namun, potensi ekonomi tersebut belum teroptimalkan secara maksimal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kapasitas manajerial pelaku UMKM, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Permasalahan pengelolaan keuangan pada UMKM bukan merupakan fenomena baru. Berbagai kajian akademis telah mendokumentasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan keuangan secara formal, mencampuradukkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha (*commingling of funds*), tidak memiliki laporan laba rugi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis, serta kesulitan mengakses layanan permodalan perbankan formal akibat ketiadaan laporan keuangan yang terstandar (Rudiantoro & Siregar, 2012; Suhairi & Wahdini, 2006). Kondisi ini secara langsung menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang, bersaing, dan bertahan dalam ekosistem pasar yang semakin kompetitif.

Dalam aspek perpajakan, rendahnya kepatuhan UMKM terhadap kewajiban pajak merupakan persoalan struktural yang telah lama menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah memberikan kemudahan bagi UMKM melalui berbagai regulasi yang bersifat insentif. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen dari omzet bruto bagi UMKM dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Lebih dari itu, UMKM dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta per tahun diberikan pembebasan pajak sepenuhnya. Meski demikian, implementasi kebijakan yang bersifat afirmatif ini seringkali tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan yang proporsional, disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang efektif dan rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM (Wahyudi, 2022).

Problematika yang serupa teridentifikasi secara empiris di Desa Labuhan Sumbawa. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa (FEB UTS), ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM di wilayah tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, tidak mengetahui adanya fasilitas tarif pajak final 0,5 persen bagi UMKM, dan sama sekali tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang tertib. Kondisi ini semakin diperparah oleh tidak adanya program pendampingan keuangan yang berkelanjutan dari instansi pemerintah daerah

setempat.

Urgensi intervensi akademis dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mengatasi kesenjangan literasi keuangan dan pajak UMKM ini telah divalidasi oleh berbagai penelitian terdahulu. Handayani dan Anggraini (2020) menemukan bahwa pelatihan pembukuan sederhana berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dilakukan secara intensif dan terpandu mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara signifikan. Senada dengan itu, Kurniawati et al. (2021) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik UMKM lokal efektif meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak. Lebih jauh, Mulyani et al. (2019) menegaskan bahwa pendampingan yang bersifat berkelanjutan (*continuous mentoring*), bukan sekadar pelatihan satu kali, merupakan kunci keberhasilan peningkatan kapasitas manajerial UMKM jangka panjang.

Dalam konteks regional NTB, kebutuhan akan program pendampingan semacam ini semakin mendesak mengingat data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di provinsi ini beroperasi di sektor informal tanpa pencatatan keuangan apapun, dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Program pengembangan ekonomi daerah seperti NTB Gemilang yang tengah diakselerasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB membutuhkan fondasi UMKM yang sehat secara manajerial, dan hal ini mustahil tercapai tanpa intervensi sistematis di bidang literasi keuangan dan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini diinisiasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa dengan tujuan: (1) meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM di Desa Labuhan Sumbawa melalui pelatihan pencatatan dan pembukuan sederhana berbasis SAK EMKM; (2) mensosialisasikan kewajiban dan hak perpajakan UMKM berdasarkan regulasi terkini, termasuk prosedur registrasi NPWP, penghitungan PPh final 0,5 persen, dan tata cara pelaporan SPT melalui e-Filing; serta (3) membangun kesadaran kolektif pelaku UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib sebagai instrumen pengambilan keputusan bisnis dan akses permodalan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dan dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang secara metodologis menempatkan subjek dampingan, yang dalam hal ini pelaku UMKM sebagai mitra aktif dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, dan evaluasi program, bukan sekadar objek pasif penerima informasi (Kemmis & McTaggart, 2005). Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan literasi keuangan dan kepatuhan pajak pada UMKM bersifat kontekstual dan sangat terikat pada kondisi sosial-ekonomi lokal, sehingga solusi yang efektif harus dibangun dari dalam dan bersama komunitas, bukan sekadar diimposisikan dari luar. Program pengabdian ini diselenggarakan oleh tim dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa, mencakup Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, yang berkolaborasi dengan aparaturnya Desa Labuhan Sumbawa dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa sebagai mitra institusional. Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 12 bulan Januari Tahun 2026, dengan lokasi terpusat di Balai Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,

Kabupaten Sumbawa. Peserta yang terlibat berjumlah 40 pelaku UMKM yang dipilih secara purposif mewakili berbagai sektor usaha yang beroperasi di wilayah desa tersebut. Secara operasional, pelaksanaan program dibagi ke dalam tiga tahapan sistematis yang saling berkesinambungan:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap Pertama: Analisis Situasional dan Penilaian Kebutuhan

Tahap pertama merupakan fase investigasi awal yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan berbasis data mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Desa Labuhan Sumbawa. Aktivitas pada tahap ini meliputi:

- Kunjungan lapangan dan observasi partisipatif untuk memetakan karakteristik usaha, skala operasional, dan kondisi umum pelaku UMKM di wilayah sasaran.
- Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan keuangan dan perpajakan yang paling krusial dan mendesak untuk diselesaikan.
- Pelaksanaan pre-test terstruktur menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur baseline pengetahuan peserta pada tiga domain utama: pencatatan keuangan dasar, pemahaman laporan keuangan sederhana, dan literasi perpajakan UMKM.
- Analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual pengetahuan peserta dengan standar minimum kompetensi yang diperlukan untuk pengelolaan usaha yang sehat secara finansial dan patuh secara perpajakan.
- Penyusunan modul pelatihan yang bersifat tailor-made, yakni disesuaikan secara khusus dengan tingkat literasi, konteks usaha, dan kebutuhan spesifik pelaku UMKM Desa Labuhan Sumbawa, menggunakan bahasa yang sederhana, ilustrasi yang relevan dengan usaha lokal, dan format yang

mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Tahap Kedua: Pelaksanaan Lokakarya dan Pendampingan Teknis

Tahap kedua merupakan inti dari program pengabdian ini, terdiri dari rangkaian lokakarya intensif yang dilaksanakan selama dua hari penuh dengan metode *blended delivery*, memadukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi langsung, dan praktik simulasi berbasis studi kasus nyata. Lokakarya dibagi ke dalam tiga modul tematik yang berprogresi secara logis:

- a. Modul 1: Literasi Keuangan Dasar dan Pentingnya Pembukuan UMKM.
Modul pembuka ini dirancang untuk membangun kesadaran fundamental peserta mengenai urgensi pencatatan keuangan bagi keberlangsungan usaha. Materi yang disampaikan mencakup: konsep dasar akuntansi yang disederhanakan (aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban); perbedaan mendasar antara uang kas usaha dan uang pribadi; dampak nyata dari tidak memiliki pencatatan keuangan terhadap keputusan bisnis; serta pengenalan prinsip-prinsip SAK EMKM sebagai standar akuntansi yang dirancang khusus untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) seperti UMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Peserta juga diperkenalkan dengan konsep kas masuk dan kas keluar sebagai fondasi awal pencatatan yang paling sederhana.
- b. Modul 2: Praktik Pencatatan Keuangan Sederhana dan Penyusunan Laporan Keuangan.
Modul praktik ini merupakan sesi paling intensif dari keseluruhan lokakarya. Setiap peserta diberikan buku kas dan formulir pencatatan transaksi yang telah didesain secara sederhana dan disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing. Materi praktis yang diajarkan dan langsung disimulasikan mencakup: tata cara mencatat transaksi penjualan, pembelian bahan baku, pengeluaran operasional, dan penerimaan modal; penyusunan buku kas harian; rekonsiliasi sederhana antara catatan dan kondisi kas aktual; serta penyusunan laporan laba rugi sederhana dan neraca ringkas sesuai format SAK EMKM yang disederhanakan. Tim pengabdian mendampingi peserta secara langsung dalam kelompok kecil (5-6 orang per kelompok) untuk memastikan pemahaman yang merata dan memberikan koreksi langsung terhadap kesalahan pencatatan.
- c. Modul 3: Sosialisasi Kewajiban Perpajakan dan Tata Cara Pemenuhan Pajak UMKM.
Modul ketiga menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa untuk memberikan sosialisasi perpajakan yang komprehensif namun tetap menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh pelaku UMKM awam. Materi perpajakan yang disampaikan meliputi: penjelasan tentang kewajiban perpajakan UMKM beserta konsekuensi hukum ketidakpatuhan; prosedur dan persyaratan pendaftaran NPWP secara daring maupun luring; penjelasan terperinci mengenai mekanisme penghitungan dan penyetoran PPh final 0,5 persen berdasarkan PP 55/2022 beserta simulasi penghitungannya; ketentuan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun; serta panduan praktis pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui platform e-Filing DJP Online. Sesi ini juga membuka ruang tanya jawab yang luas untuk menjawab keraguan dan pertanyaan spesifik dari masing-masing peserta sesuai kondisi usaha mereka.

Tahap Ketiga: Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Lanjutan

Untuk mengukur efektivitas program secara kuantitatif dan memastikan keberlanjutan manfaat yang telah diperoleh peserta, tahap ketiga dirancang sebagai fase monitoring dan evaluasi yang terstruktur.

Aktivitas pada tahap ini meliputi:

- Pelaksanaan post-test menggunakan instrumen evaluasi yang identik dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan secara terukur dan dapat dibandingkan.
- Observasi langsung terhadap kualitas catatan keuangan yang telah dibuat oleh peserta selama periode pendampingan dua minggu pasca-lokaknya.
- Sesi klinik keuangan (financial clinic) secara berkelompok kecil untuk memberikan umpan balik konstruktif dan menindaklanjuti kesulitan spesifik yang dihadapi masing-masing peserta dalam menerapkan materi pelatihan.
- Penyerahan modul panduan ringkas (pocket guide) yang dapat digunakan secara mandiri oleh peserta sebagai referensi berkelanjutan setelah program berakhir.
- Analisis data pre-test dan post-test menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung margin peningkatan rata-rata skor dan distribusi peningkatan pemahaman per domain materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peserta dan Kondisi Awal UMKM (Pra-Intervensi)

Fase analisis situasional mengungkap profil yang kaya dan beragam dari pelaku UMKM di Desa Labuhan Sumbawa. Dari 40 peserta yang terlibat dalam program, 62,5 persen (25 peserta) berjenis kelamin perempuan dan 37,5 persen (15 peserta) laki-laki, mencerminkan dominasi perempuan dalam sektor usaha informal di wilayah pesisir yang juga dikonfirmasi oleh data BPS NTB (2024). Dari segi jenis usaha, peserta terdiri dari pedagang warung/toko kelontong (35%), usaha kuliner dan catering (25%), pengolah hasil laut (15%), pedagang hasil pertanian (12,5%), dan usaha jasa lainnya (12,5%). Mayoritas peserta (72,5%) telah menjalankan usahanya selama lebih dari tiga tahun, menunjukkan bahwa permasalahan yang ada bukan disebabkan oleh ketidakdewasaan usaha, melainkan oleh absennya pendampingan kapasitas manajerial yang sistematis.

Hasil observasi mendalam dan wawancara pendahuluan mengonfirmasi hipotesis awal tim pengabdian mengenai kesenjangan literasi keuangan dan perpajakan yang sangat signifikan. Sebanyak 95 persen peserta mengakui tidak pernah memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi. Tidak ada satu pun peserta (0%) yang menyelenggarakan pembukuan formal, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Seluruh peserta (100%) mengandalkan ingatan dan perkiraan kasar dalam menentukan apakah usaha mereka mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu. Dalam aspek perpajakan, kondisinya bahkan lebih memprihatinkan: 87,5 persen peserta tidak memiliki NPWP, dan dari 12,5 persen yang sudah ber-NPWP, tidak ada satu pun yang pernah melaporkan SPT. Keseluruhan peserta tidak mengetahui adanya ketentuan tarif pajak final 0,5 persen bagi UMKM.

Tabel 1. Profil Demografis Peserta Program Pengabdian

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	25	62,5
	Laki-laki	15	37,5
Lama Usaha	< 1 tahun	3	7,5
	1-3 tahun	8	20,0

Jenis Usaha	> 3 tahun	29	72,5
	Warung/Toko Kelontong	14	35,0
	Kuliner/Catering	10	25,0
	Pengolah Hasil Laut	6	15,0
	Pedagang Pertanian	5	12,5
	Usaha Jasa Lainnya	5	12,5
Kepemilikan NPWP	Memiliki NPWP	5	12,5
	Tidak Memiliki NPWP	35	87,5
Penyelenggaraan Pembukuan	Ada (formal)	0	0,0
	Tidak Ada	40	100,0

Sumber: Data primer (2026)

Pelaksanaan Lokakarya dan Respons Peserta

Lokakarya tiga modul yang dilaksanakan selama satu hari penuh yaitu pada tanggal 12 Januari 2026 dari pukul 08.00 WITA sampai 16.00 WITA di Balai Desa Labuhan Sumbawa berlangsung dengan antusiasme yang melampaui ekspektasi tim pengabd. Kehadiran peserta mencapai 100 persen dari target 40 orang pada hari pertama, dan 95 persen (38 orang) pada hari kedua. Tingkat kehadiran yang tinggi ini mencerminkan tingginya kebutuhan dan motivasi intrinsik pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas manajerial mereka, sejalan dengan temuan Riani et al. (2020) yang menegaskan bahwa UMKM di daerah memiliki antusiasme tinggi terhadap program pelatihan ketika materi yang ditawarkan dirasakan langsung relevan dengan permasalahan nyata yang mereka hadapi sehari-hari.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada Modul 1 yang berfokus pada literasi keuangan dasar, reaksi paling kuat dari peserta muncul ketika tim pengabd menyajikan simulasi sederhana tentang dampak pencampuran uang usaha dan uang pribadi terhadap kemampuan analisis profitabilitas usaha. Banyak peserta yang sebelumnya merasa usahanya 'jalan-jalan saja' akhirnya menyadari bahwa tanpa pemisahan yang jelas, mereka tidak memiliki

dasar untuk mengetahui apakah usaha mereka sesungguhnya menghasilkan keuntungan atau justru merugi. Kesadaran ini membuka pintu motivasi yang sangat kuat bagi peserta untuk mulai menerapkan pencatatan.

Sesi paling menantang namun sekaligus paling impaktif adalah Modul 2, di mana peserta secara langsung mempraktikkan pengisian buku kas harian dan formulir rekap transaksi sederhana menggunakan contoh kasus yang diambil dari jenis usaha masing-masing. Tim pengabdian membagi peserta ke dalam delapan kelompok kecil beranggotakan lima orang, yang masing-masing didampingi oleh satu dosen atau mahasiswa sebagai fasilitator. Pendekatan small-group mentoring ini terbukti efektif mengakomodasi perbedaan kecepatan belajar dan tingkat pemahaman awal yang bervariasi di antara peserta, sebagaimana direkomendasikan oleh Situmorang et al. (2021) dalam kajian mereka tentang model pelatihan UMKM yang efektif.

Modul 3 tentang perpajakan yang dibawakan bersama narasumber dari KPP Pratama Sumbawa menjadi sesi dengan tingkat partisipasi tanya jawab tertinggi. Kekhawatiran tentang sanksi pajak atas ketidakpatuhan di masa lalu, prosedur pemutihan, dan pertanyaan teknis tentang cara menghitung 0,5 persen dari omzet mengalir deras dari peserta. Tim KPP Pratama Sumbawa menjawab dengan penuh kesabaran dan menegaskan bahwa program Tax Amnesty dan kebijakan sunset provision tersedia bagi wajib pajak yang ingin memulai kepatuhan dari awal. Respons antusias dari sesi ini mengafirmasi temuan Wardani dan Wati (2018) bahwa ketidakpatuhan pajak pada UMKM lebih banyak disebabkan oleh ketidaktahuan dibandingkan oleh niat untuk menghindari pajak.

Evaluasi Peningkatan Pengetahuan (Transfer of Knowledge)

Instrumen evaluasi ganda pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh 40 peserta menghasilkan data kuantitatif yang secara konsisten menunjukkan keberhasilan program dalam mentransfer pengetahuan dan membangun kompetensi. Secara agregat, nilai rata-rata pre-test berada pada angka 42,8 dari skala 100, jauh di bawah batas minimum kompetensi yang ditetapkan sebesar 60 poin. Kondisi awal ini secara statistik mengonfirmasi temuan observasional mengenai defisit pengetahuan yang mendalam pada ketiga domain materi pelatihan. Pasca-intervensi, nilai rata-rata post-test melonjak drastis ke angka 78,6, mencatat margin peningkatan absolut sebesar 35,8 poin atau setara dengan kenaikan sebesar 83,6 persen dari baseline awal.

Tabel 3. Distribusi Persentase Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta

Rentang Nilai	Kategori Pemahaman	Frekuensi Pre-Test	Persentase Pre-Test (%)	Frekuensi Post-Test	Persentase Post-Test (%)
81-100	Sangat Baik	0	0,0	18	45,0
61-80	Baik	3	7,5	17	42,5
41-60	Cukup	22	55,0	5	12,5
21-40	Kurang	11	27,5	0	0,0
< 20	Sangat Kurang	4	10,0	0	0,0
	Total	40	100,0	40	100,0

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tabel 4. Analisis Komparatif Peningkatan Pengetahuan Per Domain Materi

Domain Materi Pelatihan	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Margin Peningkatan (Poin)
Literasi Keuangan Dasar & Pentingnya Pembukuan	48,5	81,5	+ 33,0
Praktik Pencatatan & Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana	38,0	76,0	+ 38,0
Literasi Perpajakan UMKM (NPWP, PPh Final, SPT)	31,5	72,5	+ 41,0
Rata-Rata Keseluruhan	42,8	78,6	+ 35,8

Sumber: Data primer diolah (2026)

Data pada Tabel 3 menunjukkan pergeseran distribusi yang sangat dramatik. Pada saat pre-test, tidak ada satu pun peserta yang berada pada kategori Sangat Baik, sementara lebih dari sepertiga peserta (37,5%) berada pada dua kategori terbawah (Kurang dan Sangat Kurang). Pasca-intervensi, seluruh peserta berhasil melampaui batas minimum kompetensi dengan tidak ada satu pun yang tersisa di dua kategori terbawah tersebut. Lebih membanggakan, hampir sembilan dari sepuluh peserta (87,5%) kini berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Fenomena migrasi pemahaman masif ini secara kuantitatif menegaskan efektivitas metodologi PAR yang digunakan dalam program pengabdian ini.

Tabel 4 memberikan perspektif yang lebih granular tentang pola peningkatan di masing-masing domain. Menariknya, domain Literasi Perpajakan mencatat margin peningkatan terbesar (+41,0 poin) sekaligus memiliki baseline awal yang paling rendah (31,5), mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan adalah area yang paling defisit namun juga paling responsif terhadap intervensi edukasi yang tepat sasaran. Temuan ini konsisten dengan penelitian Cahyadi dan Jati (2016) yang menemukan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara tatap muka dan interaktif, dibandingkan sekadar penyebaran brosur, memiliki dampak yang jauh lebih signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pajak wajib pajak UMKM.

Pembahasan: Implikasi Teoretis dan Praktis

Hasil program pengabdian ini menggaungkan dan memperkuat temuan dari sejumlah studi pemberdayaan UMKM yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan peningkatan literasi keuangan yang tercatat sejalan dengan simpulan Handayani dan Anggraini (2020) yang membuktikan bahwa pelatihan pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM yang dikombinasikan dengan pendampingan intensif mampu meningkatkan kompetensi pencatatan keuangan pelaku UMKM secara signifikan, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebelumnya. Keberhasilan ini juga mengafirmasi argumen Warsono et al. (2010) bahwa akuntansi bagi UMKM tidak harus kompleks untuk menjadi berguna—format pencatatan yang sederhana, konsisten, dan disesuaikan dengan konteks usaha sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajerial dasar.

Dalam dimensi perpajakan, temuan program ini merespons secara positif kesimpulan Sari dan Afriyenti (2020) bahwa rendahnya kepatuhan pajak UMKM lebih banyak bersumber dari ketidaktahuan dan persepsi keliru tentang kerumitan sistem pajak, bukan dari niat untuk menghindar secara sengaja.

Intervensi sosialisasi yang dilakukan bersama KPP Pratama Sumbawa berhasil mendekonstruksi persepsi keliru tersebut, khususnya mengenai tarif pajak yang ringan (0,5%) dan pembebasan pajak bagi usaha beromzet kecil. Fakta bahwa seluruh peserta yang belum ber-NPWP menyatakan akan mendaftarkan diri pasca-lokakarya merupakan indikator kualitatif yang sangat positif dari keberhasilan perubahan sikap (*attitude change*) yang diharapkan dari program ini.

Dimensi penting lainnya yang perlu dikritisi secara jujur adalah tantangan keberlanjutan (*sustainability challenge*) yang merupakan hambatan struktural paling umum dalam program pengabdian serupa. Sebagaimana dikritisi oleh Purwanto et al. (2021), manfaat jangka panjang dari pelatihan UMKM sangat bergantung pada ada tidaknya mekanisme penguatan pasca-pelatihan, baik melalui pembentukan kelompok belajar mandiri, pendampingan berkala oleh lembaga pendidikan tinggi, maupun dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dalam konteks Desa Labuhan Sumbawa, tim pengabdian telah merekomendasikan kepada aparat desa untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa bagi pembentukan klinik keuangan UMKM yang bersifat permanen, serta menjalin nota kesepahaman dengan KPP Pratama Sumbawa untuk sosialisasi perpajakan berkala di tingkat desa.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, telah berhasil mencapai seluruh tujuan strategis yang ditetapkan dengan hasil yang memuaskan secara kuantitatif maupun kualitatif. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* yang dikombinasikan dengan metode lokakarya intensif dan pendampingan teknis berbasis kelompok kecil, program ini berhasil mentransfer pengetahuan dan kompetensi yang sangat signifikan kepada 40 pelaku UMKM sasaran.

Secara terukur, nilai rata-rata pengetahuan peserta meningkat dari 42,8 menjadi 78,6—sebuah lompatan sebesar 35,8 poin (83,6 persen) yang mencerminkan keberhasilan transformasi literasi yang substansial. Peningkatan paling dramatis terjadi pada domain literasi perpajakan (+41,0 poin), yang sebelumnya merupakan wilayah pengetahuan paling defisit namun berhasil diintervensi secara efektif melalui sosialisasi kolaboratif dengan KPP Pratama Sumbawa. Secara kualitatif, peserta menunjukkan perubahan perilaku nyata: mereka mulai mencatat transaksi harian secara tertib, memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi, dan memahami hak serta kewajiban perpajakan mereka sebagai UMKM.

Berdasarkan hasil dan temuan program, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan program serupa di masa mendatang. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa perlu mengintegrasikan program pendampingan keuangan dan pajak UMKM ke dalam agenda pembangunan desa secara formal, dengan alokasi anggaran yang memadai dari Dana Desa. Kedua, Universitas Teknologi Sumbawa perlu melembagakan program pendampingan UMKM sebagai agenda pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, bukan episodik, dengan membangun kemitraan jangka panjang bersama pemerintah desa, KPP Pratama Sumbawa, dan lembaga keuangan mikro setempat. Ketiga, penelitian lanjutan dengan desain longitudinal perlu dilakukan untuk mengukur tingkat retensi pengetahuan dan perubahan perilaku nyata peserta dalam jangka panjang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh dalam konteks operasional usaha sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Profil UMKM dan ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat 2023*.
- Cahyadi, I. G., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh kesadaran, moral, sikap, dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 996–1024.
- Darussalam, Hutagaol, D., & Septriadi, D. (2020). *Konsep dan aplikasi perpajakan Indonesia* (Edisi revisi). DDTC.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa. (2024). *Data UMKM Kabupaten Sumbawa 2023–2024*.
- Ediraras, D. T. (2010). Akuntansi dan kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(2), 152–158.
- Fitriasari, D. (2011). Usaha kecil dan menengah (UKM) dan praktik akuntansi: Menuju penerapan SAK UKM. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 22(2), 133–146.
- Handayani, R., & Anggraini, D. (2020). Pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis SAK EMKM bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Abdimas Dewantara*, 3(2), 135–148. <https://doi.org/10.30738/ad.v3i2.7582>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2022–2023*.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–604). SAGE Publications.
- Kristianto, D., Suharno, & Widarno, B. (2012). Penggunaan informasi akuntansi berdasarkan skala usaha dan umur perusahaan: Studi UMKM di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 9(1), 141–150.
- Kurniawati, E., Nugroho, A., & Affandi, A. (2021). Sosialisasi perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 45–52. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i1.7842>
- Mulyani, S., Suryandari, D., & Setiawan, D. (2019). Pendampingan pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i1.2>
- Nasr, S., & Pearce, D. (2012). *SMEs for job creation in the Arab world: SME access to financial services*. The World Bank.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Purwanto, A., Riyanto, S., & Cahyono, Y. (2021). Keberlanjutan program pelatihan UMKM pasca pandemi Covid-19: Faktor-faktor penentu keberhasilan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 5(2), 149–162. <https://doi.org/10.21009/JPMM.005.2.01>

- Riani, W., Widiastuti, N. M., & Ardana, I. K. (2020). Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan sederhana di Kota Denpasar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 19(1), 191–196. <https://doi.org/10.24843/BUM.2020.v19.i01.p27>
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.01>
- Sari, M., & Afriyenti, M. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2426–2442. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.214>
- Situmorang, M., Siahaan, R., & Manurung, S. (2021). Efektivitas model pelatihan kelompok kecil dalam meningkatkan kompetensi pembukuan UMKM di daerah pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 68–75. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.22>
- Suhairi, S., & Wahdini, W. (2006). Persepsi akuntan terhadap overload standar akuntansi keuangan (SAK) bagi usaha kecil dan menengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 189–210.
- Wahyudi, M. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM setelah berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022. *Jurnal Perpajakan*, 15(1), 31–44. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. *Jurnal Nominal*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Warsono, S., Darmawan, A., & Ridha, M. A. (2010). *Akuntansi UMKM ternyata mudah dipahami dan dipraktikkan*. Asgard Chapter.
- World Bank. (2022). *Small and medium enterprises (SMEs) finance: Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital*.